



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Lantai II Gedung E Pulau Semiun
Kode Pos : 29783 Email: dinkes_natuna@ymail.com
Ranai - Provinsi Kepulauan Riau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 29 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DI PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di unit pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, dengan penetapan indikator prioritas mutu dan penilaian kinerja;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara mutu dan kinerja pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Wilayah kerja Dinas Kesehatan perlu ditetapkan indikator mutu dan kinerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penilaian Kinerja merupakan Gambaran Tingkat Pencapaian Hasil Cakupan dan Mutu Kegiatan serta Manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan;
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menetapkan **INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA**;
- KETIGA** : Indikator Penilaian kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika terjadi kekeliruan didalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA



RIZAL RINALDY, S. Si. T, M. Kes
Pembina Tk.1
NIP. 19650414 199303 1 017

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor 06 Tahun 2020
 Tentang Penetapan Indikator Penilaian Kinerja di Puskesmas
 Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

**PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DI PUSKESMAS
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA**

NO	Jenis Pelayanan	Definisi Operasional	Satuan	Target				
I	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			2018	2019	2020	2021	2022
	1. Membuat laporan Data profil puskesmas	Data Pencapaian Cakupan Program Pokok Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Lalu	Dokumen	14	14	14	14	14
	2. Menyusun RUK Puskesmas	Menyusun RUK melalui Analisa dan Perumusan Masalah berdasarkan prioritas masalah	Dokumen	14	14	14	14	14
	3. Menyusun RPK Secara Terperinci dan Lengkap	RPK merupakan Garis-garis besar Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas	Dokumen	14	14	14	14	14
	4. Melaksanakan Mini Lokakarya Bulanan	Melakukan pertemuan lokakarya mini bulanan	Pertemuan/ Bulan	168	168	168	168	168
	5. Melaksanakan Mini Lokakarya Tribulanan (lintas Sektor)	Melakukan pertemuan lokakarya mini tribulanan (lintas Sektor)	Pertemuan/ Tribulan	56	56	56	56	56
	6. Membuat Data 10 Penyakit Terbanyak setiap Bulannya	Data yang diambil dari LB 1 puskesmas untuk mengetahui angka kesakitan tertinggi dan jenis penyakitnya	Berkas	168	168	168	168	168
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei IKM	IKM	baik	baik	baik	baik	baik

8. Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga sehat)	Pendataan seluruh keluarga dalam wilayah kerja dengan menggunakan Profil Kesehatan Keluarga (Pro Kesga) dan pemberian edukasi melalui Paket Informasi Edukasi Keluargasehat / PIN KESGA	%	50%	100%	100%	100%	100%
II MANAJEMEN OBAT DAN ALAT HABIS PAKAI							
1. Kesesuaian item obat yang tersedia dengan FORNAS	Total item obat yang termasuk dalam FORNAS dibagi dengan total item obat yang tersedia di Puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Kesesuaian ketersediaan obat dengan pola dengan pola penyakit	Kesesuaian jenis obat yang tersedia di Puskesmas dengan pola penyakit yang ada di wilayah Puskesmas adalah jumlah jenis obat yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis obat untuk semua kasus di Puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tingkat ketersediaan obat	Jumlah (kuantum) obat yang tersedia Puskesmas untuk pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas dibagi dengan jumlah (kuantum) pemakaian rata-rata obat per bulan. Jumlah jenis obat dengan jumlah (kuantum) minimal sama dengan waktu tunggu kedatangan obat dibagi dengan jumlah semua jenis obat yang tersedia di Puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Ketepatan permintaan obat	Permintaan kebutuhan obat untuk Puskesmas ditambah dengan sisa stok dibagi dengan pemakaian obat per bulan	%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Prosentase dan nilai obat rusak/kadaluarsa	Jumlah jenis obat yang rusak atau kadaluarsa dibagi dengan total jenis obat	%	20	20	20	20	20

	6. Keteepatan distribusi obat	Jenis obat yang didistribusikan sesuai dengan metode IMPREST untuk menjaga stok tetap pada sub unit pelayanan dengan total jenis obat yang didistribusikan untuk sub unit pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	7. Presentase rata-rata bobot dari variasi persediaan	Presentase bobot rata-rata perbedaan antara catatan persediaan dengan kenyataan fisik obat dari indikator obat yang ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Presentase rata-rata waktu kekosongan obat	Jumlah hari obat kosong dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	100
	9. Presentase obat yang tidak diresepkan	Jumlah jenis obat yang tidak pernah diresepkan selama 6 (enam) bulan dibagi jumlah jenis obat yang tersedia	%	50	50	50	50	50	50
	10. Presentase Penulisan resep obat generik	Jumlah resep yang menuliskan obat generik dibandingkan dengan jumlah resep keseluruhan	%	100	100	100	100	100	100
III	MANAJEMEN KETENAGAAAN								
	1. Membuat daftar / catatan kepegawaian petugas	Kepala Puskesmas membuat catatan tugas setiap pegawainya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas	Setiap pegawai mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab masing masing serta di SK kan oleh kepala puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya	Setiap petugas mempunyai rincian tugas bulanan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan diketahui oleh kepala puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Membuat Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tepat waktu	Setiap pegawai PNS membuat penilaian SKP tepat waktu setiap tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) kepegawaian Puskesmas	Puskesmas wajib membuat DUK setiap ada pengurangan dan penambahan pegawai	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Membuat Rencana Kebutuhan SDM sesuai Peta Jabatan	Puskesmas wajib membuat rencana kebutuhan SDM dan Anjab serta Analisa Beban Kerja (ABK) sesuai dengan peta Jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Tenaga Kesehatan Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)	Tenaga Kesehatan wajib memiliki STR sesuai Permenkes tahun 2014	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Membuat (Surat Izin Praktek (SIP), Surat Izin Kerja (SIK), bagi Tenaga Kesehatan	Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki SIP dan SIK	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV MANAJEMEN UMUM DAN KEPEGAWAIAN								
1. Menyusun Tata Naskah	Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyajian, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. b. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.								

2. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai	c. Adapun Jenis kenaikan pangkat adalah kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Disamping itu terhadap PNS dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang tewas dalam tugas, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia; mencapai BUP; cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatannya		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	PENGGAJUAN ANGKA KREDIT: Sekurang-kurangnya 1 tahun dari jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan Sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Menyusun Target Sasaran Kinerja Pegawai dan Melakukan Penilaian SKP	SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Ketepatan Pengusulan Cuti Pegawai	Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.	%	80%	90%	100%	100%	100%	100%

6. Keteepatan Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	a. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;						100%
7. Keteepatan Pengusulan KARIS/KARSU	KARIS / KARSU adalah kartu identitas Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah Isteri / Suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan						
8 Menyusun Daftar Urutan Keangkatan Pegawai	Pengertian DUK atau Daftar Urut Keangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkat keangkatannya.	%	100%	100%	100%	100%	100%

9. Mengirim Dokumen Pembinaan Disiplin Pegawai	Pembinaan disiplin dibagi kedalam dua asumsi yaitu: pertama, Pengawasan disiplin yang meliputi kegiatan mengikuti apel pagi dan sore, menandatangani daftar hadir, setelah masuk jam kerja wajib berada di ruangan kerja. Dan kedua, Pemberian sanksi yaitu memberikan hukuman kepada pegawai yang tidak disiplin	%	80%	90%	100%	100%	100%
10. Membuat Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pegawai	Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Atau definisi analisis jabatan yaitu merupakan kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur.	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.						

	11. Membuat Peta Jabatan	Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.	%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Membuat Informasi Faktor Jabatan	Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional .	%	100%	100%	100%	100%	100%
V	UKM ESENSIAL							
I	PROMKES							
	A. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada :							
	1. Rumah Tangga	Rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan PHBS	%	10%	56%	60%	70%	73%
	2. Institusi Pendidikan (sekolah)	Institusi Pendidikan yang mendapatkan penyuluhan PHBS	%	20%	100%	100%	100%	100%
	3. Institusi Sarana Kesehatan	Institusi Sarana Kesehatan yang mendapatkan penyuluhan PHBS	%	30%	100%	100%	100%	100%
	4. Institusi TTU	Tempat Tempat Umum yang mendapatkan penyuluhan PHBS	%	30%	80%	80%	80%	80%
	5. Institusi Tempat Kerja	Institusi Tempat kerja yang mendapatkan penyuluhan PHBS	%	30%	80%	80%	80%	80%
	B. Mendorong terbentuknya upaya kesehatan bersumber masyarakat							
	1. Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	%	20%	50%	60%	65%	65%
	2. Desa Siaga Aktif	Persentase Desa Siaga Aktif	%	20%	25%	30%	35%	35%
	3. Desa Yang Memanfaatkan dana desa Untuk Bidang Kesehatan	Jumlah desa yang memanfaatkan Dana desa untuk bidang kesehatan (sumber dana pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat)	Desa / Kel	50	76	76	76	76

4. Organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan	Organisasi kemasyarakatan	-	1	2	3	3
5. Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	Tema Pesan	-	10	15	20	23
6. Puskesmas yang mengembangkan Saka Bakti Husada	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Saka Bakti Husada	Puskesmas	-	1	2	3	3
7. Puskesmas yang melaksanakan kampanye Germas minimal 5 tema melalui minimal 3 saluran media	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kampanye Germas minimal 5 tema melalui minimal 3 saluran media	Puskesmas	-	14	14	14	14
8. Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan tingkat kecamatan	Jumlah Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan tingkat kecamatan	Peraturan-Peraturan/Surat Keputusan/surat edaran	-	14	14	14	14
9. Desa yang memiliki kebijakan PHBS	Persentase desa yang memiliki kebijakan PHBS	Peraturan-Peraturan/Surat Keputusan/surat edaran	-	5%	10%	15%	20%
10. Sekolah Yang mempromosikan Kesehatan	Sekolah yang mendapatkan Promosi Kesehatan	- Ruang UKS	%	-	100%	100%	100%
		- Pembinaan Dokter Kecil					
		- Kampanye Delapan Indikator PHBS					
		- Penjarangan Peserta Didik kelas 1 - 9					
		Rumah Tangga ber PHBS					
11. Survei Rumah Tangga PHBS	Rumah Tangga ber PHBS	%	27%	30%	35%	40%	43%

2.	KESEHATAN LINGKUNGAN							
		Persentase Desa / Kelurahan yang terverifikasi sebagai desa yang melaksanakan STBM, dimana desa / kel yang memenuhi kriteria sbh :						
	a. Desa STBM	1. Telah dilakukan pemecuan STBM	%	80%	90%	100%	100%	100%
		2. Telah memiliki natural leader						
		3. Telah Memiliki Rencana Kerja Masyarakat						
	b. Pengawasan sarana air minum	Persentase sarana air minum yang diawasi kualitas produksinya secara eksternal yang di buktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium	%	60%	70%	80%	90%	90%
	c. Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan	%	50%	60%	70%	75%	80%
	d. Cakupan Rumah Bebas Jentik	Persentase rumah yang tidak ditemukan jentik dibanding jumlah rumah yang di amati dikalikan 100 %	%	95%	95%	95%	95%	95%
	e. Rumah Sakit yang melakukan Pengolahan Limbah Medis sesuai Standar	Rumah sakit yang melakukan pemisahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan dengan memisahkan limbah medis dan non medis, sampai dengan proses pengolahan akhir	Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	f. Puskesmas yang melakukan Pengolahan Limbah Medis sesuai Standar	Puskesmas yang melakukan pemisahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan dengan memisahkan limbah medis dan non medis, sampai dengan proses pengolahan akhir	Puskesmas	14	14	14	14	14

5. Tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase TPM yang memenuhi syarat hygiene sanitasi yang di buktikan dengan sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (HSTBM)	%	40%	50%	60%	70%	75%
6. Penduduk yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persentase Penduduk terakses sanitasi yang layak	%	60%	65%	70%	75%	80%
3 KESERHATAN IBU ANAK DAN KB							
A. Program Kesehatan Ibu dan Anak							
1. Pasang usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persentase Pasang usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	78%	80%	81%	82%	83%
2. Ibu hamil yang memiliki buku KIA	Persentase Ibu hamil yang memiliki buku KIA	%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Kunjungan ibu hamil K4	Persentase Kunjungan ibu hamil K4	%	92%	92.50%	93%	93.50%	94.00%
4. Pelaksanaan program P4K	Desa / Kelurahan Pelaksanaan program P4K	Desa/Kelurahan	76	76	76	76	76
5. Puskesmas yang melakukan Orientasi P4K	Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi P4K	%	95%	96%	97%	98%	99%
6. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93%	94%	95%	96%	97%
8. Persalinan difasilitasi kesehatan	Persentase Persalinan difasilitasi kesehatan	%	75%	80%	87%	90%	95%
9. Kunjungan nifas	Persentase Kunjungan nifas	%	89%	90%	91%	92%	93%
10. Kunjungan Neonatus 1 (KN1)	Persentase Kunjungan Neonatus 1 (KN1)	%	82%	83%	84%	85%	86%

11. Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	Persentase Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	%	82%	83%	84%	85%	85%
12. Kunjungan Bayi	Persentase Kunjungan Bayi	%	85%	86%	88%	90%	92%
B. Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita							
1. Puskesmas yang melaksanakan SIDIDTK anak pra sekolah	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIDIDTK anak pra sekolah	%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Puskesmas yang melakukan penjarangan peserta didik kelas 1	Persentase Puskesmas yang melakukan penjarangan peserta didik kelas 1	%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Puskesmas yang melakukan penjarangan peserta didik kelas 7 dan 10	Puskesmas yang melakukan penjarangan peserta didik kelas 7 dan 10	%	100%	100%	100%	100%	100%
C. PROGRAM GIZI							
1. Penanggulangan kasus gizi buruk	Persentase kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Balita Kurus dan Sangat kurus	Persentase wasting (kurus dan sangat kurus)	%	7.09%	6.89%	6.69%	6.49%	6.10%
3. Balita Kurus dan sangat kurus yang mendapat makanan tambahan	Persentase balita kurus dan sangat kurus yang mendapat makanan tambahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Ibu hamil dengan KEK yang mendapat makanan tambahan	Persentase ibu hamil dengan KEK yang mendapat makanan tambahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet	%	92%	92.50%	93%	93.50%	94.00%
6. Ibu Hamil dengan anemia yang ditangani	Persentase ibu hamil dengan anemia yang di tangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Rumah tangga mengonsumsi garam beryodium	Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beryodium	%	90%	91%	91.50%	92%	93%

8. Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	%	40%	41%	41.50%	42%	45%
9. Ibu nifas yang mendapat kapsul Vitamin A	Persentase ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A	%	92%	93%	94%	96%	97%
10. Bayi baru lahir yang mendapat IMD	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi menyusui diri)	%	50%	55%	55.50%	60%	65%
11. Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif	Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif	%	55%	55.50%	55.80%	60%	6.1%
12. Balita yang mempunyai buku KIA/ KMS	Persentase Balita yang mempunyai buku KIA/ KMS	%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	Persentase Balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	%	80%	85%	85.50%	86%	86.50%
14. Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	%	55%	58%	60%	60.5%	60.9
4. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT							
A. PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR							
1. Penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB)							
a. Penemuan Kasus TB	Persentase pasien baru BTA Positif yang ditemukan dan diobati dibanding jumlah pasien baru BTA Positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Angka Penjarangan Suspect TB	Persentase Pasien BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspect yang diperiksa dahaknya	%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%
c. Keberhasilan Pengobatan TB semua Kasus	Persentase semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TB yang di obati dan dilaporkan	%	90%	90%	90%	90%	90%

d. Cakupan penemuan kasus TB resisten Obat	Jumlah kasus TB resisten Obat berdasarkan hasil pemeriksaan tes cepat molekuler (TCM) atau BTA diantara perkiraan kasus TB resisten obat	%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%
e. Keberhasilan Pengobatan Pasien TB resisten Obat	Persentase kasus TB resisten obat yang menyelesaikan pengobatan dan sembuh atau pengobatan lengkap diantara jumlah kasus TB Resistensi Obat yang memulai pengobatan	%	100%	100%	100%	100%	100%
f. Pasien TB yang mengetahui Status HIV	Persentase pasien TB yang diperiksa HIV	%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)							
a. Kejadian DBD ditangani sesuai standar	Persentase kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penanggulangan Diare							
a. Penemuan kasus Diare semua umur	Penemuan Kasus Diare di semua golongan umur disarana kesehatan dan kader diwilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Penemuan kasus Diare pada balita	Penemuan Kasus Diare pada balita disarana kesehatan dan kader diwilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Cakupan Pelayanan Diare	Persentase penderita diare yang dilayani dalam satu tahun dibagi target penemuan penderita pada tahun yang sama	%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Penggunaan Oralit	Penderita Diare yang berobat di Sarana Kesehatan dan Kader dan diberikan oralit di bagi seluruh penderita diare	%	100%	100%	100%	100%	100%
e. Penggunaan infus Ringer Laktat (RL)	Persentase penderita diare dengan derajat dehidrasi berat yang diberi cairan RL di sarana kesehatan di bagi dengan penderita diare yang dilayani	%	1%	1%	6%	1%	1%
f. Penderita Diare pada Balita yang mendapat tablet ZINC	Jumlah penderita diare balita yang diberikan tambahan tablet zinc dibagi jumlah diare balita	%	100%	100%	100%	100%	100%
g. Angka Kematian Diare	Jumlah Kematian penderita diare pada saat terjadi KLB diare di wilayah puskesmas di bagi penderita diare Pada saat KLB	%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%
3. Penanggulangan HIV							
a. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Persentase Orang yang terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Kasus HIV yang diobati	Penderita HIV yang di obati dibagi seluruh penderita yang ditemukan dikalikan 100	%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Malaria							
a. Annual Parasit Indeks (API)	Jumlah slide positif parasit malaria per 1000 penduduk	%	< 1 ‰	< 1 ‰	< 1 ‰	< 1 ‰	< 1 ‰
b. Slide Positif Rate (SPR)	Slide positif Malaria dibagi seluruh slide malaria yang diperiksa dikalikan 100	%	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
c. Tidak ada Kasus Penularan setempat (indigenus)	Malaria yang ditemukan dalam satu wilayah	%	0%	0%	0%	0%	0%

5. Penanggulangan Cacingan								
Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan	Jumlah anak usia 1-12 tahun yang diberikan obat cacing dibagi jumlah seluruh anak usia 1-12 tahun kali 100 persen	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengendalian ISPA								
a. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Penderita pneumoni Balita yang harus ditemukan di suatu wilayah dalam satu tahun dibagi perkiraan jumlah penderita pneumonia balita	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Perkiraan jumlah balita 10 % jumlah penduduk							
	- Perkiraan pneumonia balita 10% jumlah balita							
	- Puskesmas dengan tenaga terlatih dibagi jumlah seluruh Puskesmas kali 100 %							
b. Proporsi Puskesmas dengan Tenaga Terlatih mengelola program dan teknis pengendalian ISPA	Kasus Pneumonia Balita yang ditatalaksana di suatu wilayah Puskesmas dalam 1 tahun dibagi perkiraan jumlah penemuan pneumonia Balita di wilayah kerja tersebut dalam 1 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita								
6. Penanggulangan Kusta								
a. Angka Penemuan Kusta	Penemuan kasus baru kusta dalam satu tahun per 100000 penduduk	%	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk	$\frac{5}{5/100000}$ penduduk
b. Proporsi Puskesmas yang memiliki tenaga pengelola program kusta terlatih	Puskesmas yang memiliki tenaga pengelola program kusta terlatih dibagi jumlah seluruh Puskesmas dikali 100%	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
c. Ibu hamil yang diteliti dini hepatitis	Jumlah ibu hamil yang dites hepatitis dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Surveilans Penyakit yang Dapat di Cegah dengan Imunisasi (PD3I)	Membuat laporan surveillance PD3I secara rutin setiap bulan	Bulan	168	168	168	168	168	168
9. Sweeping Drop Out (DO) Imunisasi	Melakukan pencarian dan pemberian imunisasi kepada bayi dan balita yang imunisasi nya belum lengkap.	Bulan	168	168	168	168	168	168
10. Pemberian Imunisasi Meningitis	Pemberian Imunisasi Meningitis kepada Calon Jemaah Haji	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. PENYAKIT TIDAK MENULAR								
A. Persentasi Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM)	Data Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Hasil Pemeriksaan	40%	50%	60%	70%	75%	
B. Persentasi Desa/Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan POSBINDU PTM	Data Laporan Pelayanan Kegiatan Posbindu Desa/Kelurahan	Hasil Pemeriksaan	40%	50%	60%	70%	75%	
C. Persentasi Wanita Usia Subur (WUS) Umur 30-50 tahun yang melakukan Pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Data Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Data Kegiatan Bakti Sosial IBI	Hasil Pemeriksaan	40%	50%	60%	70%	75%	
D. Persentasi yang melaksanakan Kegiatan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada WUS 30-40 th	Data Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Data Kegiatan Bakti Sosial IBI	Hasil Pemeriksaan	40%	50%	60%	70%	75%	
E. Persentasi Sekolah yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Data Laporan Kegiatan Puskesmas	Hasil Laporan Kegiatan	40%	50%	60%	70%	80000%	
VI. UKM PENGEMBANGAN								
1. PERKESMAS								
a. Cakupan Keluarga Rawan yang mendapat pelayanan kunjungan rumah	Individu dan keluarganya dari keluarga rawan yang mendapat keperawatan kesehatan masyarakat (Home care)	Keluarga miskin	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2. Kesehatan jiwa								

a. Persentasi ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa	Data Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas dan data Dinas SOSIAL	Hasil Laporan Puskesmas dan data DINAS SOSIAL	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentasi PASUNG yang dibebaskan/mendapat pelayanan kesehatan	Data Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas dan data Dinas SOSIAL	Hasil Laporan Puskesmas dan data DINAS SOSIAL	100%	100%	100%	100%	100%
3. KESEHATAN LANJUT USIA							
Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	%	100	100	100	100	100
4. KESEHATAN INDERA							
Persentasi Puskesmas yang melaksanakan deteksi diri dan Rujukan Katarak	Data Laporan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas	Hasil Pemeriksaan	20%	30%	40%	50%	60%
5. KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA							
Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan reproduksi Remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan reproduksi Remaja	%	100	100	100	100	100
6. KESEHATAN TRADISIONAL							
a. Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk	Kelompok yang mampu melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional	Puskesmas	14	14	14	14	14
b. Pembinaan ke Penyehat Tradisional	Pendataan dan pembinaan kepada penyehat tradisional dibagi jumlah penyehat tradisional diwilayah kerja	Penyehat Tradisional	30%	50%	60%	65%	70%
c. Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Tradisional	Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan tradisional	Puskesmas	1	1	2	4	6

7. KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA									
a. Pembinaan Kesehatan kerja formal dan informal	Upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan bagi pelecja disemua jabatan formal dan informal	Pokja	50	65	70	77	80		
b. Pembentukan Pos UKK	Terbentuknya Pos UKK untuk melakukan pelayanan Kesehatan Pekerja Informal sesuai Pokja	Pos	60	67	77	80	85		
c. Sekolah Dasar yang melaksanakan pengukuran kebugaran anak sekolah	Pengukuran kebugaran anak sekolah dasar Kelas 4 s/d 6	SD	5	8	10	14	16		
d. Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji (CJH)	Seluruh Calon Jemaah Haji dilakukan pengukuran kebugaran sebanyak 2 kali sebelum keberangkatan Haji	Kali	2	2	2	2	2		
e. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN yang ada diwilayah kerja puskesmas diukur kebugarannya	Puskesmas	3	7	10	14	14		
VII									
UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)									
1. PELAYANAN RAWAT JALAN									
a. Rasio Angka Kontak komunikasi	Perbandingan antara Jumlah kunjungan sakit + sehat di bagi jumlah peserta terdaftar di fktip dikali 1000	Peserta terdaftar di FKTP	≥ 150 %	≥ 155 %	≥ 160 %	≥ 165 %	≥ 170%		

b. Rasio Rujukan Non Spesialis	Perbandingan antara jumlah pasien yang di rujuk dengan jumlah kunjungan sakit di FKTP berdasarkan diagnose yang harus selesai di FKTP	Jumlah rujukan	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
c. Rasio Peserta Prolanis	Jumlah peserta penderita penyakit kronis yang melakukan kontak komunikasi dibagi jumlah peserta prolanis yang terdaftar	Peserta prolanis terdaftar	≥ 50%	≥ 52%	≥ 55%	≥ 60%	≥ 65%
d. Penyediaan rekam medis rawat jalan kurang dari 10 menit	Waktu yang diperlukan untuk Penyediaan Rekam Medis yang baik	Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
e. Kelengkapan pengisian rekam medik	Kepatuhan pengisian formulir Rekam Medik	Rekam Medik	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan gigi masyarakat pada ibu hamil, lansia, balita, PAUD	%	100%	100%	100%	100%	100%
3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM							
a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium		Waktu pemeriksaan	Kurang dari 120 menit	Kurang dari 120 menit	Kurang dari 120 menit	Kurang dari 120 menit	Kurang dari 120 menit
b. Kesesuaian Hasil Pemeriksaan	Ketepatan hasil pemeriksaan dengan baku mutu	Hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
c. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen		Spesimen	100%	100%	100%	100%	100%
d. Tidak adanya kesalahan data pemberian hasil pemeriksaan laboratorium		Hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
4. PELAYANAN RAWAT INAP							
a. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	Waktu yang diperlukan untuk Penyediaan Rekam Medis yang baik kurang dari 15 menit	Rekam Medik	100%	100%	100%	100%	100%

b. Kelengkapan pengisian rekam medik	Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap dalam 24 jam	Rekam Medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN								
a. Cakupan Masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk dalam satu wilayah dikali 100%	Kartu Jaminan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	Penyediaan Layanan Kesehatan medis dan non medis kepada masyarakat miskin	Layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Tidak adanya biaya tambahan yang diagihkan pada keluarga miskin	Pasien Keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa iuran bayar	Pelayanan Kesehatan Gratis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

KEP. DINAS
RIZAL SINALDY, S. Si. T. M. Kes
Perpina Tk. I
N P. 19650414 199303 1 017